

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Berawal dari tuntutan masyarakat agar terciptanya *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis otonomi daerah di Indonesia, menjadikan kinerja sebagai bagian yang sangat penting memberikan pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran yang berhak diketahui oleh publik Silalahi (2017). Menurut PP No 90 Tahun 2010, dalam rangka mengikuti dinamika perkembangan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berbasis kinerja, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) salah satu diantaranya kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran dapat memberikan kemudahan bagi (OPD) untuk menyusun rencana kegiatan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah, sehingga anggaran dapat dijadikan tolak ukur pencapaian kinerja dengan kata lain kualitas anggaran daerah dapat menentukan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah daerah Nadirsyah,dkk. (2012) dalam Widyatana (2014). Kualitas proses pengukuran kinerja sangat dipengaruhi oleh kualitas proses penganggaran karena pengukuran kinerja merupakan mata rantai yang berkesinambungan dengan penganggaran Putra (2013).

Faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi salah satunya adalah sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* menyatakan bahwa terdapat hubungan antara komitmen organisasi, pengendalian intern dan penerapan *good governance* terhadap kinerja organisasi. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan Prasetyono & Kompyurini (2007).

Berdasarkan PP No. 101 tahun 2000 menyatakan *good governance* adalah pemerintah mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Melaksanakan *good governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri Mulyawa (2015).

Dengan demikian pegawai harus profesionalisme sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, tepatnya perubahan sosial diikuti dengan perubahan manajemen pemerintahan. Para pegawai pada dasarnya media atau instrument penyelenggaraan pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan atau merupakan jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Para pegawai harus profesional dalam melayani masyarakat karena profesionalisme pegawai merupakan arah serta tujuan dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Instruksi Presiden Nomor. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Mewajibkan setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan sasaran strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Media yang digunakan untuk pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah untuk menjawab kewajiban tersebut yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu

kesatuan, yaitu perencanaan strategi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan Pemanfaatan informasi kinerja M.Amar (2012). Pemerintah dalam menyusun suatu rencana strategi juga harus memperhatikan dasar hukum dan peraturan yang berlaku. Banyak sekali kasus penyelewengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang tidak sesuai dengan hukum bahkan ada juga Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang tidak melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hasil evaluasi analisis capaian akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2018, hasil keseluruhan evaluasi akuntabilitas kinerja Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin memperoleh nilai 61,12 atau predikat B, penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sudah menunjukan hasil yang baik.

Komponen yang dinilai di antaranya perencanaan kerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kerja. Untuk perencanaan kinerja meraih skor 20.79, pengukuran kinerja 14.70, pelaporan kinerja 10.75, evaluasi internal 6.20, dan capaian kinerja 8.67 ditahun 2018. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tercatat sebanyak 7 Perangkat Daerah (PD) meraih predikat A, tercatat sebanyak 8 Pemerintah Daerah (PD) yang meraih predikat B dan tercatat meraih predikat C tercatat ada 10 Pemerintah Daerah (PD) (<https://sumateranews.co.id/akuntabilitas-kinerja-instansi-pemkab-muba>).

Berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih belum maksimal dalam kinerja Organisasi Pemerintah Daerah karena masih banyak yang pemerintah daerah yang mendapatkan predikat C dalam penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Indrayani,dkk (2017) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pengendalian intern memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja organisasi publik, menurut penelitian Claraini (2017) dan Azlina dan Amelia (2014) menyatakan *good governance* dan sistem

pengendalian intern berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini penulis menambahkan satu variabel independen yaitu profesionalisme berdasarkan penelitian Adri (2017) menyatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilihat bahwa Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sitem Pengendalian Intern, *Good Governance* dan Profesionalisme diduga menjadi faktor dalam mendukung *good governance* yang mempengaruhi dalam meningkatkan Kinerja Organisasi Pemerintah Daerah, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Determinasi Kinerja Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin**”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah *Good Governance* berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Profesionalisme berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?
5. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*, Profesionalisme berpengaruh secara bersama-sama terhadap

Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu pada Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*, Profesionalisme berpengaruh secara parsial dan bersama-sama Terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Musi Banyuasin, dimana penulis menyebarkan kuesioner untuk Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Bidang Keuangan serta Kepala Bidang Perencanaan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis *Good Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Profesionalisme berpengaruh terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

5. Untuk mengetahui dan menganalisis Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance*, Profesionalisme berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat digunakan sebagai bahan referensi khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Internal, *Good Governance* Profesionalisme berpengaruh secara parsial dan bersama-sama terhadap Kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan.
3. Bagi khasanah ilmu pengetahuan, sebagai rujukan penyelesaian operasional dan pengambilan kebijakan di instansi/lembaga sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk dilakukannya penelitian-penelitian akuntansi sektor publik selanjutnya.